

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SMART ENVIRONMENT* DALAM MEWUJUDKAN
SMART CITY OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
(Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Provinsi Jawa
Timur)**

FACHRUR ROZZY RAMADHAN

NPP. 31.0534

Asdaf Kota Kediri, Jawa Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: rozzyramadhan@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ely Sukmana, S.H., M.H.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Environmental management to achieve the goal of zero waste requires the involvement of all stakeholders, including the government and the community.*

Purpose: *The amount of waste in Kediri City has become a serious issue that needs immediate attention to realize the concept of Smart Environment, where there is no longer accumulated waste through the digital platform of the E-Bank Sampah application. One of the main interests in the digitalization of waste management is to accelerate, simplify, and enhance efficiency through the E-Bank Sampah digital platform.* **Methods:** *This study adopts a qualitative approach with a descriptive method to understand phenomena related to the implementation of Smart Environment policies by the Department of Environment, Cleanliness, and Parks in Kediri City, using data collection techniques such as Observation, Interviews, and Documentation.*

Results: *This platform not only facilitates waste distribution but also enables access to current information and waste categorization. Supporting factors for the implementation of Smart Environment policies include clear regulations, synergy among program implementers, and awareness of the importance of digitalization. However, there are still obstacles such as lack of digital understanding, suboptimal facilities, and resistance to change. Compliance of program implementers, human, financial, and natural resources, as well as the power and strategies of stakeholders, are crucial in achieving policy objectives.* **Conclusion:** *Efforts by the Kediri City Government to provide education and training for the community to effectively implement Smart Environment policies in Kediri City are commendable. The positive impact of this policy is evident in the increased Smart Environment index of Kediri City and the enhanced skills of government officials in waste management.*

Keywords: *smart environment, digitalization, waste management*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pengelolaan lingkungan untuk mencapai tujuan bebas limbah sampah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.*

Tujuan: *Jumlah sampah di Kota Kediri menjadi masalah serius yang harus segera ditangani guna mewujudkan konsep Smart Environment, di mana tidak ada lagi limbah sampah yang menumpuk melalui platform digital aplikasi E-Bank Sampah. Salah satu kepentingan utama dalam digitalisasi pengelolaan sampah adalah mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi melalui platform digital E-Bank Sampah.* **Metode:** *Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena terkait pelaksanaan kebijakan Smart Environment oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan di*

Kota Kediri, dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil:** Platform ini tidak hanya memudahkan penyaluran sampah, tetapi juga memfasilitasi akses informasi terkini dan pengelompokan sampah. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan Smart Environment meliputi regulasi yang jelas, sinergi antar pelaksana program, dan kesadaran akan pentingnya digitalisasi. Namun, masih ada hambatan seperti kurangnya pemahaman digital, fasilitas yang belum optimal, dan resistensi terhadap perubahan. Kepatuhan pelaksana program, sumber daya manusia, finansial, dan alam, serta kekuasaan dan strategi aktor, penting dalam mencapai tujuan kebijakan. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk memberikan edukasi maupun pelatihan bagi masyarakat agar dapat melaksanakan kebijakan Smart Environment dengan baik di Kota Kediri. Dampak positif kebijakan ini terlihat dalam peningkatan indeks Smart Environment Kota Kediri dan peningkatan keterampilan penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan limbah sampah.

Kata Kunci: lingkungan cerdas, digitalisasi, pengelolaan sampah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat era sekarang sangat membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan yang praktis, cepat, dan efisien (Hutasoit et al., 2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. SPBE bertujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Prinsip-prinsip SPBE diatur oleh Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pada tingkat nasional, manajemen dan tata kelola SPBE menjadi krusial untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penggunaan sistem tersebut. SPBE tidak hanya terbatas pada penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam kegiatan operasional sehari-hari pemerintahan, tetapi juga mencakup beberapa domain seperti Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi, serta Layanan. Dalam domain Kegiatan Pemerintahan, SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE, serta Data dan Informasi Elektronik. Pada domain Teknologi dan Informasi, SPBE melibatkan Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE, dan Keamanan Informasi Pemerintah. Sedangkan di domain Layanan, SPBE mencakup Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Indeks SPBE Provinsi Jawa Timur menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2021, indeks ini mengalami penurunan sebesar 0.58, namun kembali meningkat sebesar 0.48 pada tahun 2022 menjadi 3.30. Meskipun nilai indeks SPBE Provinsi Jawa Timur tidak stabil, nilai tersebut masih dikategorikan baik dalam penyelenggaraan SPBE.

Konsep kota cerdas atau Smart City merupakan salah satu hasil dari implementasi SPBE, yang mengandalkan digitalisasi dan teknologi informasi serta komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, kualitas hidup penduduk, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konsep Smart City, data dan teknologi digunakan secara cerdas untuk memahami dan mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Pelaksanaan Smart City diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan. Kota Kediri merupakan salah satu daerah yang terpilih untuk mendapatkan pendampingan dalam menyusun masterplan dan quick win Smart City..

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Bagian ini mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi SPBE, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Penurunan indeks SPBE pada tahun 2021 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi dan kualitas implementasi sistem ini. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2022, masih terdapat beberapa evaluasi yang perlu

dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas SPBE dalam mendukung konsep Smart City di Kota Kediri.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, disajikan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik dan tema yang akan diteliti oleh peneliti. Fungsinya adalah untuk menggambarkan perbedaan dengan cara membandingkan studi sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti memberikan ikhtisar mendalam tentang lima penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.

Judul penelitian Implementasi Program KIOS E-PAKLADI Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 oleh Taufiqurrahman membahas topik pelayanan administrasi melalui sebuah Program KIOS E-PAKLADI yang diluncurkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan. Metode yang penelitian kuantitatif deskriptif yang dianalisis mulai pengumpulan data, reduksi, penyajian hingga penarikan kesimpulan (Taufiqurrahman, 2023).

Penelitian Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo Tahun 2022 yang dilakukan oleh Tui yang menekankan pada gambaran menyeluruh mengenai inovasi pelayanan publik berbasis e-Government pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi (Tui, 2022).

Mulyana dalam skripsi berjudul Implementasi Pelayanan Publik pada Program SIDUKUN 3 in 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan di DKI Jakarta Tahun 2017 berfokus pada kajian Implementasi Pelayanan Publik pada Program SIDUKUN dalam Pengurusan Administrasi kependudukan. Metode yang dipakai kualitatif deskriptif serta data yang diambil yaitu primer dan sekunder dari survei dan library research, teknik dokumentasi dan wawancara, dianalisis dengan reduksi, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Mulyana, 2017).

Penelitian berjudul Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi Selesai Dalam Genggaman (Salaman) dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2021 oleh Yuyu Purwanti membahas topik pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menerapkan inovasi pelayanan publik dengan memperkenalkan aplikasi Selesai Dalam Genggaman (SALAMAN) untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Metode yang penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang dianalisis mulai pengumpulan data, reduksi, penyajian hingga penarikan kesimpulan (Purwanti, 2021).

Nanda Pratama Auliak dalam skripsi Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2023 berfokus pada memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat pedesaan di hari Sabtu, memastikan penyelesaian layanan ini secara efisien. Metode yang dipakai kualitatif deskriptif serta data yang diambil yaitu primer dan sekunder serta menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara, dianalisis dengan reduksi, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Auliak, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Veronika Eva pada tahun 2019 yaitu Upaya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan adanya Mobil Keliling (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu). Fokus penelitian ini yaitu membahas peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan layanan keliling di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sementara itu, untuk teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara, dianalisis juga dengan reduksi, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan (Eva, 2019)

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Tiawan, Gede Andry Dewa Kusuma (2023), dan Angel

Kurniawati Hematang dari STMIK Primakara, Bali berjudul Smart Environment dalam mewujudkan Smart City Sebagai Optimalisasi Pengeleloaan Sampah Dan Pendayagunaan Masyarakat di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali dengan metode Penelitian kombinasi difusi iptek dan substitusi iptek untuk mendiskripsikan Smart Environment dalam mewujudkan Smart City Sebagai Optimalisasi Pengeleloaan Sampah Dan Pendayagunaan Masyarakat di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Hasil dari Penelitian ini adalah transisi bank sampah menuju bank sampah digital untuk membantu operasional bank sampah di Desa Pejaten.

Jurnal ilmiah yang ditulis Muryani R., Santoso S., Firdiyani F. (2023) Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia dengan judul Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Aplikasi Mobile dalam Mewujudkan Smart Environment (Studi Kasus Bank Sampah Meranti Dikelurahan Buaran Indah Kota Tangerang) menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori Misuraca menghasilkan sistem kerja aplikasi Bank Sampah sesuai dengan dimensi ekonomi, sosial, dan pemerintahan berjalan dengan baik. Aplikasi yang digunakan sangat membantu pengurus bank sampah dalam pelaporan data hasil masyarakat.

Jurnal Ilmiah yang ditulis Rahmat H, Ade I, Wawan S, Romi I (2023) Politeknik Lamandau dengan judul Penerapan Aplikasi Bank Sampah Untuk Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Di Kelurahan Nanga Bulik menggunakan metode deskriptif kualitatif menghasilkan penerapan aplikasi Bank Sampah yang inovatif dan pendekatan teknologi mempengaruhi partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi bank sampah sehingga menarik perhatian masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Afan Alfayad, Asroful Waro'faif Sukamto, Syahrul Ramadhan (2023) Universitas Airlangga dengan judul Optimalisasi Tradisi Bersih Desa Melalui D-TRASH (Digital Trash) Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Desa Taman Sari Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode Literature Review model PRISMA (Preferred Reporting Items for Systemic Reviews and Meta-Analysis) menghasilkan Digitalisasi Bank Sampah melalui D-Trash (Digital Trash) dengan berbagai fitur yang mendukung pengendalian sampah pada kampung Taman Sari. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta lingkungan dengan baik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni lebih memfokuskan terkait implementasi kebijakan smart environment dalam mewujudkan smart city oleh dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan di kota kediri provinsi jawa Timur. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena terkait pelaksanaan kebijakan Smart Environment oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan di Kota Kediri, dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis jumlah sampah di Kota Kediri menjadi masalah serius yang harus segera ditangani guna mewujudkan konsep Smart Environment, di mana tidak ada lagi limbah sampah yang menumpuk melalui platform digital aplikasi E-Bank Sampah. Salah satu kepentingan utama dalam digitalisasi pengelolaan sampah adalah mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi melalui platform digital E-Bank Sampah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin memberikan perhatian yang cermat terhadap

fenomena yang tengah berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi yang mendalam mengenai peristiwa yang diamati, sehingga dapat menggambarkan secara rinci implementasi kebijakan Smart Environment dalam mewujudkan Smart City di Kota Kediri.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Smart Environment dalam mewujudkan Smart City di Kota Kediri. Berikut adalah hasil analisis yang ditemukan:

3.1.1 Isi Kebijakan (Content of Policy)

a) **Kepentingan yang Dipengaruhi oleh Kebijakan**

Kebijakan Smart Environment bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Kediri. Kebijakan ini mempengaruhi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana utama, masyarakat sebagai penerima manfaat utama, dan sektor swasta sebagai mitra dalam berbagai program lingkungan.

b) **Manfaat yang Dihasilkan**

Manfaat utama dari kebijakan ini adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Kediri. Implementasi kebijakan Smart Environment diharapkan dapat mengurangi polusi, meningkatkan ruang hijau, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

c) **Derajat Perubahan yang Diinginkan**

Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Pemerintah berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program lingkungan, mengurangi tingkat polusi, dan meningkatkan kualitas udara dan air di Kota Kediri. Derajat perubahan ini diukur melalui berbagai indikator lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

d) **Kedudukan Pembuat Kebijakan**

Pembuat kebijakan ini adalah pemerintah Kota Kediri, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan. Mereka memiliki peran penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan Smart Environment. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga penting dalam proses ini untuk memastikan kebijakan dapat berjalan efektif.

e) **Pelaksana Kebijakan**

Pelaksana kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi, sementara masyarakat diharapkan aktif dalam program-program lingkungan. Sektor swasta juga diharapkan berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung kebijakan ini.

f) **Sumber Daya yang Dikerahkan**

Implementasi kebijakan ini membutuhkan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, dana, dan teknologi. Pemerintah Kota Kediri telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program lingkungan, dan berbagai teknologi hijau digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Keterlibatan masyarakat juga menjadi sumber daya penting dalam keberhasilan kebijakan ini.

3.1.2 Konteks Kebijakan (Context of Policy)

a) **Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Kebijakan ini melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Pemerintah Kota Kediri memiliki kekuasaan utama dalam implementasi kebijakan ini, sementara masyarakat dan sektor swasta memiliki kepentingan dalam keberhasilan kebijakan ini. Strategi yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif, di mana semua pihak diajak untuk terlibat aktif dalam program-program lingkungan.

b) Karakteristik Penguasa dan Lembaga

Penguasa kebijakan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Mereka memiliki tanggung jawab utama dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Lembaga ini juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, serta organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan kebijakan.

c) Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana

Kepatuhan terhadap kebijakan ini dinilai cukup tinggi, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Daya tanggap pelaksana juga terlihat dari berbagai inovasi dan program-program yang diluncurkan untuk mendukung implementasi kebijakan ini.

3.2 Faktor-faktor yang Menghambat Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

Dalam melaksanakan proses pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah pastinya memiliki kendala atau hambatan tidak selalu berjalan sesuai dan lancar. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat proses pelayanan penerbitan Akta Kelahiran. Beberapa faktor tersebut diantaranya:

1. Keterbatasan Anggaran: Meski ada alokasi anggaran, namun masih terdapat keterbatasan dalam hal dana untuk mendukung semua program yang direncanakan.
2. Kesadaran Masyarakat: Masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perlu lebih banyak edukasi dan sosialisasi.
3. Keterbatasan Teknologi: Beberapa teknologi hijau yang dibutuhkan masih terbatas ketersediaannya dan memerlukan biaya yang tinggi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sudah memadai, namun terdapat beberapa barang yang harus diperbaharui dan dibuat anggaran kepada pemerintah pusat seperti mobil pelayanan untuk menunjang program jemput bola. Sarana dan Prasarana dalam pelayanan penerbitan Akta Kelahiran yang juga menjadi penghambat proses penerbitan Akta Kelahiran menyangkut ketersediaan sarana seperti ketersediaan tinta dan printer.

3.3 Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam implementasi kebijakan *smart environment* dalam mewujudkan *smart city* oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kota Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Smart Environment dalam mewujudkan Smart City. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan:

1. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat \ Menyadari bahwa masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap isu lingkungan, DLHKP Kota Kediri terus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Program-program seperti kampanye lingkungan, seminar, dan workshop tentang pengelolaan sampah dan pentingnya lingkungan bersih secara rutin dilaksanakan. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial dan media massa untuk menjangkau lebih banyak orang.
2. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

DLHKP Kota Kediri terus memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi Smart Environment. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kota Kediri, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program lingkungan. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga diperketat untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.

3. Pengembangan Teknologi Hijau

DLHKP Kota Kediri mengadopsi teknologi hijau untuk mendukung implementasi kebijakan Smart Environment. Misalnya, penggunaan sistem digitalisasi dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi bank sampah, yang memudahkan masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah. Selain itu, teknologi energi terbarukan juga dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi karbon.

4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan. DLHKP Kota Kediri bekerja sama dengan berbagai perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program-program lingkungan. Kerja sama ini meliputi penyediaan dana, teknologi, dan sumber daya manusia untuk berbagai inisiatif lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan pendidikan lingkungan.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

DLHKP Kota Kediri melakukan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai dan petugas lapangan. Pelatihan ini mencakup penggunaan teknologi hijau, manajemen lingkungan, serta teknik sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

6. Optimalisasi Anggaran dan Sumber Day

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, DLHKP Kota Kediri mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada dan mencari sumber pendanaan alternatif. Selain mengandalkan anggaran pemerintah, DLHKP juga aktif mencari hibah dan bantuan dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang peduli terhadap isu lingkungan. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel juga diterapkan untuk memastikan dana digunakan secara efektif.

7. Peningkatan Infrastruktur Lingkungan

DLHKP Kota Kediri terus meningkatkan infrastruktur yang mendukung implementasi Smart Environment. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah, penambahan ruang terbuka hijau, dan peningkatan kualitas air bersih adalah beberapa contoh upaya yang dilakukan. Infrastruktur yang memadai akan mendukung program-program lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

8. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan Smart Environment dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang tepat. DLHKP Kota Kediri menggunakan berbagai indikator lingkungan untuk mengukur keberhasilan program dan membuat perbaikan jika diperlukan. Hasil monitoring dan evaluasi juga digunakan untuk membuat laporan yang transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui upaya-upaya ini, DLHKP Kota Kediri berkomitmen untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan mewujudkan Kota Kediri sebagai Smart City yang berwawasan lingkungan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam

keberhasilan implementasi kebijakan Smart Environment

3.4 Diskusi Temuan Utama

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Smart Environment oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri dalam mewujudkan Smart City. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan ini melibatkan program digitalisasi pengelolaan sampah, peningkatan ruang hijau, dan edukasi masyarakat, dengan penggunaan aplikasi digital seperti bank sampah untuk memfasilitasi pengelolaan sampah lebih efektif. Faktor pendukung kebijakan ini adalah dukungan dari pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan sektor swasta, sementara hambatannya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan infrastruktur yang belum memadai.

DLHKP Kota Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan regulasi dan kebijakan lingkungan, serta pengembangan teknologi hijau dan penggunaan aplikasi digital. Selain itu, DLHKP juga berkolaborasi dengan sektor swasta dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan anggaran yang ada. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta memastikan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya yang juga menekankan pentingnya teknologi digital dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Misalnya, penelitian oleh Rahmat H dkk. dan Afan Alfayad Asroful Waro'faif dkk. yang fokus pada aplikasi bank sampah dan program D-TRASH. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi lebih lanjut dengan melihat implementasi kebijakan secara holistik di tingkat kota, memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah lainnya yang ingin menerapkan kebijakan serupa.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Smart Environment oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri dalam mewujudkan Smart City telah memberikan dampak positif yang signifikan. Kebijakan ini, yang mencakup program digitalisasi pengelolaan sampah melalui aplikasi E-Bank Sampah, telah meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan sektor swasta serta masyarakat menjadi kunci utama kesuksesan kebijakan ini, meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan infrastruktur.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun ada beberapa hambatan, upaya untuk mengatasi masalah ini dilakukan melalui edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan pengembangan teknologi hijau. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi anggaran juga penting untuk memastikan keberlanjutan program. Temuan ini menunjukkan bahwa Kota Kediri memiliki potensi untuk menjadi contoh inspiratif dalam penerapan inovasi digital untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan Smart Environment dengan penerapan E-Bank Sampah telah berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dengan komitmen jangka panjang dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Kediri dapat terus mengembangkan inisiatif Smart City yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan

KaruniaNya. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas limpahan Syafaat-Nya. Terima kasih untuk doa, motivasi, dan bantuan yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, keluarga besar, dan penyejuk hati yang senantiasa tercurahkan. Peneliti juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada selaku dosen pembimbing yang sabar dan semangat memberikan ilmu, serta seluruh keluarga besar IKAPTK Kota Kediri yang telah membantu selama proses penelitian, Saudara Kontingen Jawa Timur Angkatan XXXI serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfayad, A., Sukamto, A. W., Ramadhan, S., 2023. Optimalisasi Tradisi Bersih Desa Melalui D-TRASH (Digital Trash) Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Desa Taman Sari Kabupaten Banyuwangi. *Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar*, Vol 3. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/pilar/article/view/6139>
- Auliak, N. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. *Journal Of Governance and Local Politics (Jglp)*. <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/765>
- Eva, V. (2019). Upaya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Adanya Mobil Keliling (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1789>
- Hidayat, R., Irmayanti, A., Setyawan, W., & Ismoyojati, R. . (2023). Penerapan Aplikasi Bank Sampah Untuk Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Di Kelurahan Nanga Bulik. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 1504-1509. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1114>
- Hutasoit, I., Pribadi, A. S. (2023). *Pelayanan Dokumen Akta Kematian Melalui Aplikasi Sedudo Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur*. 5 (April), 106–124. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/3743>
- Mulyana, Y., (2017). Model Kebijakan Untuk Meningkatkan Laporan Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Sosiohumaniora*, 19(2). <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9066>
- Muryani, R., Santoso, S, dan Firdiyani, F., 2023. Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Aplikasi Mobile dalam Mewujudkan Smart Environment. *Jurnal Multilingual*, Vol 3. 12-23. <https://doi.org/10.33654/multilingual.v3i1.142>
- Purwanti, Y. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Selesai Dalam Genggaman (Salaman) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. *Jurnal FISIP Universitas Pasundan*. <https://repository.unpas.ac.id/53170/>
- Rahmat, H., Ade, I., Wawan, S., dan Roni, I., 2023. Penerapan Aplikasi Bank Sampah Untuk Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Di Kelurahan Nanga Bulik. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1114>
- Taufiqurrahman, M. A., (2023). Implementasi Program Kios E-Pakladi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik*. 10(1), 276–289. <https://stia-binataruna.e->

journal.id/PUBLIK/article/view/582

Tiawan, A., Kusuma, D.G., & Kurniawati Hematang, A.. 2023. Digitalisasi Bank Sampah Sebagai Optimalisasi Pengelolaan Sampah Dan Pendayagunaan Masyarakat Di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 206–215. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3891>

Tui, F. P. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/338>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 2020

Satu Data Kota Kediri, “Score Smart City”, <https://satudata.kedirikota.go.id/>

Badan Pusat Statistik Kota Kediri, <https://kedirikota.bps.go.id/>

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, <https://diskominfo.kedirikota.go.id/>

